



Anggota Dewan Diplot Dapat Hibah Rp 4,5 M

★ Jadi Amunisi Incumbent di Pileg 2019

DENPASAR,
NusaBali

Dana hibah (dikenal dengan sebutan bansos) yang difasilitasi anggota DPRD Bali benar-benar fantastis pada 2018 mendatang. Bayangkan, per anggota Dewan diskenarionlan akan 'mengguyur' konstituennya dengan hibah sebesar Rp 4,5 miliar melalui APBD Bali 2018. Dana hibah tersebut disebut-sebut sebagai amunisi bagi incumbent untuk tarung Pileg 2019.

Informasi yang dihimpun NusaBali di

*Bersambung ke
Hal-15 Kolom 1*

JATAH DANA HIBAH ANGGOTA DPRD BALI

NO	TAHUN	BESARAN
1	2016	Rp 3,90 Miliar Per Orang
2	2017	Rp 3,90 Miliar Per Orang
3	2018	Rp 4,50 Miliar Per Orang *)

*) Kenaikan jatah hibah baru diwacanakan

FASILITAS BAGI ANGGOTA DPRD BALI

- Gaji setelah potong pajak Rp 7,20 Juta/Bulan
- Tunjangan Perumahan Rp 20,00 Juta/Bulan
- Dana Kesehatan Rp 1,60 Juta/Bulan
- Kunker ke Luar Daerah Rp 9,00 Juta/Sekali
- Sebulan maksimum 3 kali
- Kunjungan Dalam Daerah Rp 0,56 Juta/Hari
- Dana Reses Rp 82,00 Juta/Tahun
- Reses 3 bulan sekali
- Fasilitas Hibah Rp 3,90 Miliar/Tahun

Anggota Dewan Diplot Dapat Hibah Rp 4,5 M

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (16/3), untuk APBD 2017, per anggota Dewan kebagian jatah memfasilitasi dana hibah masing-masing Rp 3,90 miliar. Setahun berikutnya, dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan dirancang naik menjadi Rp 4,50 miliar per orang.

Menurut sumber tersebut, rencana kenaikan fasilitas dana hibah menjadi Rp 4,5 miliar ini sudah didahului dengan ide menaikkan tunjangan dana perumahan dari Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta/bulan per anggota Dewan. Tunjangan dana perumahan Rp 40 juta per bulan itu juga akan diusulkan di APBD Bali 2018. Tunjangan tersebut belum termasuk dana-dana lainnya yang sudah dijatah untuk anggota Dewan, seperti dana kunker 3 kali dalam sebulan, dana reses, dana kunjungan dalam daerah, dan dana kesehatan.

Rencana kenaikan dana hibah

yang difasilitasi anggota Dewan ini juga diakui Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, Senin kemarin. Politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengaku ikut membahasnya bersama unsur Pimpinan Dewan. IGP Budiarta mengatakan, rencana kenaikan dana hibah tahun 2018 ini sudah disepakati unsur Pimpinan Dewan.

"Jatah hibahnya nanti Rp 4,5 miliar per anggota Dewan untuk APBD 2018. Ya, sudah keputusan pimpinan ini. Saya ikut rapat membahasnya," ujar politisi yang akrab disapa Gung De ini saat ditemui NusaBali di Ruang Komisi IV DPRD Bali, Senin kemarin.

Gung De mengatakan, dana hibah nanti tidak akan lagi dibagikan terpisah seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun 2016 lalu, hibah dibagi dua menjadi APBD Induk dan APBD Perubahan. "Tahun ini (2017) dicairkan sekalian di APBD Induk 2017. Semuanya

akan menjadi satu di APBD Induk, supaya lebih efektif. Pola ini lebih bagus dalam memprosesnya. Jadi, di APBD Perubahan tidak ada lagi urusan dana hibah, karena adanya batas waktu pencairan yang mepet," tandas Gung De yang kemarin didampingi yang didampingi anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Tabanan, I Gede Suamba.

Ketika ditanya dengan bertambahnya dana hibah otomatis incumbent akan semakin kuat dalam tarung Pileg 2019 mendatang, Gung Budiarta membantahnya. "Jangan diarahkan ke sana. Tujuan kita merancang dana hibah ini untuk kesejahteraan masyarakat juga. Ini bukan urusan mau jadi incumbent di Pileg 2019 mendatang," tandas Gung De.

Menurut Gung De, Pileg 2019 adalah urusan partai di 2019. "Kan partai yang akan mencalonkan para anggota DPRD Bali yang sekarang duduk di Dewan ini. Nggak kontekstual urusan jadi

incumbent," ujar politisi berkepalapa plontos yang juga menjabat sebagai Bendesa Pakraman Pedungan, Denpasar Selatan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan yang dibahas Pimpinan Dewan baru soal target-target pendapatan dan DAU (Dana Alokasi Umum). "Baru soal DAU dan target-target serta rasionalisasi saja. Belum ada yang lain," tegas Sugawa Korry saat dikonfirmasi terkait wacana kenaikan jatah hibah menjadi Rp 4,5 miliar per orang, Senin kemarin.

Sedangkan salah satu ketua fraksi papan atas di DPRD Bali membenarkan adanya rencana kenaikan dana hibah per anggota dewan menjadi Rp 4,5 di 2018. "Memang benar ada usulan seperti itu untuk tahun 2018. Usulan hibah Rp 4,5 miliar memang sudah dibahas dan disepakati. Ya, kan kita berjuang untuk rakyat. Apanya salah?" katanya. **nat**

Edisi : Selasa, 14 Maret 2019

Hal : 1 dan 15



Diklarifikasi Statusnya Sebagai Tersangka ✓ Dipanggil BK, Politisi Gerindra Wayan Kicen Mangkir

SEMARAPURA, NusaBali

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana yang menjadi tersangka dugaan korupsi bansos fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, ternyata mangkir dari panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung, Senin (13/2) pagi. Kicen dipanggil BK untuk diminta klarifikasi pasca penetapan dirinya sebagai tersangka.

Setelah ditunggu-tunggu, Wayan Kicen tak kunjung datang ke Kantor DPRD Klungkung, hingga Senin siang kemarin. Bahkan setelah dihubungi via ponselnya lewat perantara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Klungkung, I Wayan Sudiarta, juga tidak ada kabar. Sambungan teleponnya terhubung namun tidak diangkat.

Beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Kicen akhirnya bisa dikonfirmasi. Kepada Sekwan dan BK dirinya mengaku tengah berada di Jakarta. "Katanya masih ada kegiatan di Jakarta, nanti akan kami agendakan lagi untuk memanggil kembali," ujar Ketua BK DPRD Klungkung, I Komang Gede Ludra kepada *NusaBali*.

Dalam panggilan tersebut, pihaknya ingin mengklarifikasi pasca diterimanya surat tembusan dari Polres Klungkung, terhadap penetapan Wayan Kicen sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos fiktif Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Kata



KETUA BK DPRD Klungkung, I Komang Gede Ludra.

Ludra, dalam klarifikasi tersebut pihaknya ingin mendengar penjelasan dari Wayan Kicen, karena dia juga memiliki hak bela. "Setelah itu baru bisa tahu apa yang dilakukan di BK," kata Ludra.

Disebutkan jika ditemukan adanya pelanggaran secara norma atau kode etik, tentu ada sanksi baik tertulis, lisan dan sanksi berat, yang akan dibahas kembali dalam rapat paripurna. Namun sanksi itu tidak menyangkut menghilangkan hak Wayan Kicen sebagai anggota dewan atau rekomendasi PAW. "Kita tidak ada untuk ranah itu," ujarnya. Sesuai tata tertib dan kode etik hanya boleh mem-PAW anggota dewan kalau kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Anggota dewan bisa diberhentikan oleh tiga faktor, di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan oleh partai. "Sebenarnya sepenuhnya persoa-

lan nasib Pak Kicen (di DPRD) berada di partai," katanya.

Di sisi lain untuk Fraksi Gerindra DPRD Klungkung akan melakukan rapat secara internal terkait dengan persoalan tersebut. "Nanti kalau hasilnya sudah ke luar kami akan sampaikan ke teman-teman media," ujar seorang anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung. Sementara, Selasa (14/3) hari ini, Wayan Kicen Adnyana akan diperiksa penyidik Tipikor Polres Sat Reskrim Polres Klungkung sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana, ikut terseret sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, bersama dua orang anaknya, yaitu Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, di Banjar Anjingan, Desa Getakan, Ketut Krisnia Adiputra, pada Rabu (25/12), dan bendaharanya Ni Kadek Endang Astiti, yang ditetapkan sebagai tersangka Jumat (24/2). Ketiga tersangka dalam kasus tersebut memiliki hubungan keluarga. Krisnia Adiputra sendiri merupakan anak keempat dari Wayan Kicen, sedangkan Kadek Endang Astiti merupakan anak kedua dari Kicen Adnyana. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena turut terlibat dalam kasus pembangunan fiktif Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Desa Getakan. wa

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 4